

**PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
KEPENGHULUAN LABUHAN TANGGA KECIL KECAMATAN
BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR**

Oleh :Egi Kurniawan Ramadhan

Dosen Pembimbing : Adlin S.Sos,M.Si

Email:egi.kurniawan0616@student.unri.ac.id

Adlinoke@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Labuhan Tangga Kecil Village, Bangko District, Rokan Hilir Regency, still has several obstacles, as evidenced by the fact that what is happening in the field is that there are still Beneficiary Families (KPM) of Non-Cash Food Assistance (BPNT) who are truly entitled but do not receive it. On the other hand, there are Beneficiary Families (KPM) who are not entitled to receive Non-Cash Food Assistance (BPNT) and also aid recipients who have data that does not match, such as the same KK number so that the aid does not match the recipient data that has been recorded. This research aims to determine the effectiveness of the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in improving the welfare of the community in the Labuhan Tangga Kecil Subdistrict and to find out what are the obstacles to the Non-Cash Assistance Program (BPNT) in improving the welfare of the community in the Labuhan Tangga Kecil Subdistrict. The theory used in this research is the BPNT (Non-Cash Social Assistance Distribution Implementation Control Team) Guide regarding the effectiveness of assistance which consists of right target, right price, right quantity, right time and right quality. The data collection techniques used in this research were questionnaires, interviews and documentation. This research was carried out in the Labuhan Tangga Kecil District, Bangko District, Rokan Hilir Regency.

The results of this research indicate that the implementation of the Non-Cash Food Assistance program in the Labuhan Tangga Kecil District, Bangko District, can be said to have been implemented effectively. This can be seen from the number of recipients who received assistance and the number of poor people in the Labuhan Tangga Kecil Penghuluan, Bangko District. However, there is still an inaccuracy in targeting recipients of the aid program, where there are KPM who are considered capable but are still registered as beneficiaries of the Non-Cash Food Assistance program. This happens because there is still a lack of monitoring by the task force and village officials towards the community and errors in collecting data.

Keywords: *Implementations, Non-Cash Food Assistance (BPNT), Welfare*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara berkembang yang ada di dunia. Saat ini, Indonesia sedang gencar dalam berupaya mencapai tujuan dasar dari negara Indonesia itu sendiri yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai penduduk yang sangat banyak, maka diperlukan peningkatan pembangunan untuk menopang kesejahteraan penduduknya. Sebagaimana yang telah dijelaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tentang kemiskinan. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia. Program Pemerintah yang berorientasi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat yaitu Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan, memberi nutrisi yang seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memberi lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini pertama kali diterapkan pada awal tahun 2017 dan telah dilaksanakan secara serentak di 44 kota yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa, dan 3 kota di

wilayah Timur. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Indonesia yaitu berjumlah 1,286.194 jiwa, dengan total bantuan yang diberikan senilai Rp 1,7 triliun.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warong yang bekerjasama dengan Bank Penyalur.

Tujuan program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) salah satunya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu. Hal ini telah diatur pada PERMENSOS No.10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan PERPRES RI No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai.

Rokan Hilir merupakan Penerima manfaat Program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) di Provinsi Riau dengan jumlah yaitu 17.000 KPM. Namun berdasarkan data yang ada, masih terdapat beberapa KPM yang tidak menerima bantuan tersebut. Sedangkan dilain pihak masih terdapat Rumah tangga yang berhak namun tidak terdata dalam penerima bantuan tersebut. Seperti data berikut:

Tabel 1. 1
Penerima manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kabupaten Rokan Hilir

Kecamatan	Penerima BPNT		Jumlah
	Tidak Ada	Ada	
Bagan Sinembah Raya	4	254	258
Bagansinembah	56	541	597
Balai Jaya	18	279	297
Bangko	63	404 7	4110
Bangko Pusako	38	146 0	1498
Batu Hampar	12	497	509
Kubu	14	750	764

Kubu Babussalam	34	538	572
Pasir Limau Kapas	28	145	1486
Pekaitan	23	457	480
Pujud	95	102	1124
Rantau Kopar	9	275	284
Rimba Melintang	6	115	1163
Simpang Kanan	34	252	286
Sinaboi	3	100	1010
Tanah Putih	21	190	1926
Tanah Putih Tanjung Melawan	26	454	480
Tanjung Medan	27	629	656
Jumlah	511	16989	17500

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir, 2022

Berdasarkan tabel diatas, kecamatan dengan penerima BPNT terbanyak yaitu kecamatan Bangko dengan jumlah penerima sebanyak 4.110 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penerima terkecil adalah kecamatan Bagan Sinembah Raya.

Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir merupakan suatu Kepenghuluan yang jumlah penduduknya sebanyak 2.617 jiwa.

Tabel 1. 2

Tingkat Ekonomi Masyarakat di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2021

No	Golongan Masyarakat	Jumlah KK			
		2018	2019	2020	2021
1	Masyarakat Golongan Atas	300	310	298	284
2	Masyarakat Golongan sedang	525	488	479	497
3	Masyarakat Golongan Bawah	1792	1819	1840	1854

Sumber : Kantor Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil, 2022

Pada Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil jumlah masyarakat golongan bawah mengalami peningkatan setiap

tahunnya dari tahun 2018 berjumlah 1.792 menjadi 1.854 KK pada tahun 2021. Peneliti melakukan wawancara dengan petugas penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengatakan bahwa Kepenghuluan ini sudah termasuk menerapkan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir. Untuk saat ini yang menerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 163 KK yang masyarakatnya tergolong pada tingkat ekonomi rendah.

Menurut pengamatan, dengan adanya Bantuan Pangan Langsung Non Tunai (BPNT) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan berupa Beras, telur, maupun uang maka masyarakat tersebut dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara efektivitas dan efisiensi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik dalam keadaan fisik maupun ekonomi dan tepat dalam sasaran penyaluran bantuan tersebut.

Tabel 1. 3

Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 - 2021

Bantuan	Jumlah KK			
	2018	2019	2020	2021
Bantuan Pangan Non Tunai	149	158	163	163

Sumber : Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil

Pada tabel diatas, jumlah penerima bantuan mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 149 KK pada tahun 2018 menjadi 163 KK pada tahun 2021. Sehingga Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil memerlukan Bantuan Pangan Non Tunai ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Adapun target dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Kepenghuluan Labuhan tangga kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut :

1. Mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai

- (BPNT) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan
2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada penerima Bantuan Pangan Non tunai (BPNT).
 3. Meningkatkan Ketepatan waktu dan sasaran dalam penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
 4. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat

Berdasarkan target dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tidak semua target tercapai hanya target satu saja yang dapat dikatakan efektif hal itu dapat dilihat pada Tabel 2 dimana jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam 4 tahun terakhir terus mengalami kenaikan yang dapat dikatakan kurang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan kurang tepat sasaran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Implementasi BPNT di di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko, sebagai ternyata tetap disertai dengan kasus-kasus yang muncul di lapangan, seperti data ganda, e-warong yang tidak beroperasi sesuai dengan ketentuan, dan kualitas beras Perum Bulog untuk BPNT yang dianggap belum sesuai kebutuhan KPM. Berbagai kasus tersebut berpotensi mengganggu efektivitas dari keberhasilan implementasi BPNT di Rokan Hilir, apabila tidak diselesaikan dengan baik. Potensi permasalahan pun dapat semakin besar jika Program BPNT diperluas jenis komoditasnya dan diperbesar nilai bantuannya menjadi Program Sembako.

Pelaksanaan BPNT di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko mengacu pada masyarakat yang telah terdaftar menjadi peserta KPM, selain akan mendapat bantuan sosial dari program BPNT peserta tersebut akan secara otomatis terdaftar menjadi peserta program keluarga harapan (PKH), di dalam kartu KKS elektronik terdapat sistem saving, account, dan e wallet atau dompet elektronik sehingga peserta KPM dapat membelanjakan dana sosial untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Apabila bantuan tersebut masih tersisa dan tidak habis dalam jangka waktu 1 bulan, maka dana tersebut akan secara otomatis tersimpan ditabungkan serta dapat digunakan kembali

pada bulan berikutnya.

Masalah yang sering terjadi adalah pada KPM lansia yang kurang mengerti cara pengambilan Bantuan Pangan Nontunai, seperti cara menekan pin dan prosedur pengambilannya. Peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial menyebutkan bahwa SDM kesejahteraan sosial adalah sumber daya manusia yang melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Berdasarkan observasi, Bansos PKH jenis BPNT yang diterima KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Kecamatan Bangko, barang pangan yang diterimanya tidak sesuai dengan total nilai uang per 3 bulan Rp.600ribu yang per bulannya Rp. 200ribu. Selain itu, terdapat dugaan beberapa media dan nara sumber menyebutkan adanya indikasi permainan pada bantuan pangan non tunai (BPNT) di Rohil ini,¹

Dugaan adanya fee 10 ribu untuk pihak terkait antara suplier inisial dengan pejabat Rohil yang menangani BPNT untuk daerah Rohil. Selain itu, ditemukan adanya E Waroeng Tanpa Legalitas, yang sangat merugikan penerima manfaat bantuan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian ini yang diberi judul **PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KEPENGHULUAN LABUHAN TANGGA KECIL KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR**

2. Rumusan Masalah

Dengan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai yang efektif ini bisa memperbaiki masalah-masalah yang ada seperti data KPM yang tidak padan. Beberapa hal yang menjadi permasalahan saat ini adalah terkait permasalahan diatas adalah sebagai berikut: Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk mensejahterakan

masyarakat di Kepenghuluan Labuhan
Tangga Kecil ?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Beberapa hal yang menjadi tujuan dari penelitian terkait pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai ((BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Mensejahterakan Masyarakat di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil

B. Kerangka Teori

1. Kebijakan Pelaksanaan

Menurut Mazmanian dan sebatier (2014:68) pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan.

Menurut Abdullah (2014:151) pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

2. Efektivitas

2.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Effendy (2008:14) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan”.

Menurut Adisasmita (2011: 170) efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil dapat tercapai tetapi mungkin dengan penghamburan pikiran, tenaga, waktu, uang atau benda.

2.2 Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan

untuk mengukur sejauh mana aktivitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu: (Starawaji, 2009).

- Pendekatan Sasaran
- Pendekatan Sumber
- Pendekatan Proses

2.3 Pengukuran Efektifitas

Menurut Campbel dalam (Mutiarin, 2014) di dalam melakukan pengukuran tingkat efektivitas sebuah program, kegiatan ataupun organisasi terdapat beberapa pengukuran yang paling menonjol diantaranya sebagai berikut:

- Keberhasilan program
- Keberhasilan capaian sasaran
- Kepuasan terhadap program
- Tingkat input dan output
- Pencapaian tujuan menyeluruh

Keberhasilan proram Bantuan Pangan Nontunai diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T yaitu tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat administrasi (Pedoman Umum BPNT, 2019). untuk mencapai keberhasilan Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) maka mekanisme pelaksanaan harus dilakukan dengan baik dan benar:

- Ketepatan sasaran, pemanfaatan BPNT hanya diberikan kepada keluarga yang tercantum dalam DTKS.
- Tepat Harga, Harga beras dan/atau telur dari pemasok ke e-warong lebih murah dibandingkan dengan harga eceran di pasaran.
- Ketepatan jumlah, yaitu besaran BPNT merupakan hak KPM adalah Rp 110.000 per KPM per bulan dengan berupa sembako.
- Ketepatan waktu, yaitu waktu pelaksanaan penyaluran program BPNT kepada KPM Desa sesuai dengan rencana distribusi.
- Ketepatan Kualitas, pemanfaatan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh KPM untuk mengurangi pemenuhan kebutuhan pangan dan meningkatkan kebutuhan gizi terjamin.
- Ketepatan administrasi, terpenuhinya persyaratan

administrasi bagi calon penerima BPNT secara benar dan tepat.

2. Bantuan Pangan Non Tunai

2.1 Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui rekening bank selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan. (Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018)

Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketetapan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif, dan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tetap sasaran dan tepat waktu untuk mendukung pelaksanaan program BPNT.

2.2 Kriteria Bantuan Pangan Non Tunai

BPNT disalurkan di lokasi kabupaten kabupaten/ kota yang memiliki fasilitas jaringan komunikasi / internet yang mampu menunjang pelaksanaan penyaluran BPNT serta e-warong. Bank penyaluran mengidentifikasi agen bank, pedagang, dan atau pihak lain untuk dapat menjadi E-warong sebagai penyaluran BPNT dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulusan proses uji tuntas (due diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank penyaluran.
- b. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/ atau kegiatan tetap lainnya.
- c. Memiliki jaringan informasi dan kerjasama antara agen/ took dengan pemasok/ distributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian oleh KPM.
- d. Menjual beras dan atau telur sesuai harga pasar
- e. Dapat melayani KPM dan Non KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan dan f. Memiliki komitmen yang

tinggi dalam pelayanan khusus bagi KPM Lanjut Usia dan KPM disabilitas.

2.3 Penyaluran BPNT

Proses penyaluran BPNT dilaksanakan oleh bank penyaluran dan diberikan tanpa pengenaan biaya. Proses penyaluran dan diberikan tanpa pengenaan biaya. Proses penyaluran dilakukan dengan memindah bukukan dana dari rekening direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku kuasa pengguna anggaran di bank penyaluran kepada rekening e-wallet KPM BPNT.

- 1) Pemindah bukukan dana dari rekening direktorat jenderal penanganan fakir miskin kepada bank penyalur kepada rekening e-wallet KPM BPNT dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak dana ditransfer dari kas negara ke rekening direktorat penanganan fakir miskin di bank penyalur.
- 2) Penyaluran ke dalam rekening e-wallet KPM BPNT dilakukan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berjalan
- 3) Proses penyaluran BPNT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan mengenai belanja bantuan sosial yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan.

3. Rumah Tangga Miskin

Di Indonesia sendiri terdapat 5 versi untuk mengukur indikator kemiskinan yaitu: (Tamboto, 2019: 39)

1. Versi Bank Dunia, diukur berdasarkan penghasilan yang diperoleh orang miskin yang memiliki maksimal pendapatannya adalah US\$ 2 per hari.
2. Versi International Labour Organization (ILO) miskin di pedesaan dengan maksimal pendapatannya adalah US\$ 0,8 per hari.
3. Versi BKKBN yaitu apabila seluruh keluarga nya tidak mampu untuk makan 2 kali sehari.
4. Versi Dinas Kesehatan yaitu ada anggota keluarga yang putus sekolah atau tidak, frekuensi makan makanan kurang dari 2 kali.
5. Versi BPS yaitu tingkat konsumsi makanan kurang dari 2100 kalori/kapita/per hari dan kebutuhan minimal non makan (sandang, papan, kesehatan dan pendidikan).

berikutnya.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh pihak masyarakat penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai. Metode ini digunakan ketika metode survei ataupun eksperimen dirasakan tidak praktis. Sehingga, jenis penelitian *fiel research* adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan bertujuan untuk menemukan masalah yang bersifat mendalam kemudian memecahkannya di masyarakat penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir melalui proses wawancara dengan informan-informan terkait, serta data-data lainnya yang diperoleh peneliti.

Jenis penelitian adalah deskriptif. Tipe penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial berdasarkan fakta yang ada

D. Hasil dan Pembahasan

1. Identitas Responden

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari responden, penelitian ini dengan sampel penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 62 responden. Peneliti di dalam menyebarkan kuesioner ini dengan cara membagikan kepada para penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara langsung. Deskripsi responden penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 4

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	48	77,42
2	Perempuan	14	22,58
	Total	62	100

Sumber: Data olahan hasil penelitian, 2023

Berdasarkan tabel 3.1 dapat diketahui bahwa dari 62 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian diperoleh bahwa responden laki-laki lebih banyak dari perempuan yaitu sebesar 48 responden laki-

laki (77,42%) dan perempuan sebanyak 14 orang (22,58%). Hal ini dikarenakan, biasanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan berdasarkan kepala keluarga.

Deskripsi Identitas Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner mengenai usia responden dalam penelitian ini diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1. 5

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia Responden

No	Umur (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	< 20	0	0,00
2	21-25	5	8,06
3	26-30	7	11,29
4	31-35	11	17,74
5	36-40	17	27,42
6	40>	22	35,48
	Total	62	100

Sumber: Data olahan hasil penelitian, 2023

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat dilihat 5 responden atau 8,06 persen responden yang berusia 21-25 tahun, 7 responden atau 11,29 persen responden usia 26- 30 tahun, 11 responden atau 17,74 persen usia 31-35 tahun, 17 atau 27,42 persen usia 36-40 tahun dan 22 responden atau 35,8 persen usia diatas 40 tahun.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden adalah usia diatas 40 tahun. Banyaknya responden yang berusia tersebut, dikarenakan umumnya pada umur tersebut sudah memiliki keluarga dengan jumlah tanggungan yang banyak, sehingga beban ekonomi cukup besar. Beban ekonomi yang besar membuat masyarakat berada digaris kemiskinan sehingga diperlukan bantuan berupa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Deskripsi Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner mengenai tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1. 6
Distribusi Responden Berdasarkan
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	SD	11	17,74
2	SMP	29	46,77
3	SMA	19	30,65
4	D3 ke atas	3	4,84
	Total	62	100%

Sumber: Data olahan hasil penelitian, 2023

Berdasarkan tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa 11 responden atau 17,74 persen yang berpendidikan SD, 19 responden atau 30,65 persen yang berpendidikan SMP, 29 responden atau 46,77 persen berpendidikan SMA, dan 3 responden atau 4,84 persen berpendidikan D3 ke atas. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden adalah berpendidikan SMA. Umumnya penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah keluarga miskin sehingga mempunyai tingkat pendidikan rendah.

Deskripsi Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner tentang pekerjaan responden dalam penelitian ini diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1. 7
Distribusi Responden Berdasarkan
Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Petani	26	41,94
2	Buruh	14	22,58
3	Pedagang	6	9,68
4	Karyawan	4	6,45
5	Lainnya	12	19,35
	Jumlah	62	100%

Sumber: Data olahan hasil penelitian, 2023

Berdasarkan tabel 3.4 di atas dapat dilihat terdapat 26 responden atau 41,94 persen bekerja sebagai petani, 14 responden atau 22,58 persen bekerja sebagai Buruh, 6 responden atau 9,68 persen bekerja sebagai Pedagang, 4 responden atau 6,45 persen bekerja sebagai

Karyawan, 12 responden atau 19,35 persen bekerja sebagai Karyawan. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden adalah Petani dengan persentase 41,94 persen. Banyaknya responden yang berasal dari petani dikarenakan umumnya mata pencarian masyarakat Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir adalah petani.

Deskripsi Identitas Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner tentang pendapatan responden dalam penelitian ini diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1. 8
Distribusi Responden Berdasarkan
Jumlah Tanggungan

No	Jumlah Tanggungan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	1 tanggungan	4	6,45
2	2 tanggungan	7	11,29
3	3 tanggungan	14	22,58
4	4 tanggungan	17	27,42
5	5 tanggungan	11	17,74
6	> 5 tanggungan	9	14,52
	Total	62	100

Sumber: Data olahan hasil penelitian, 2023

Berdasarkan tabel 3.5 di atas dapat dilihat terdapat 4 responden atau 6,45 persen mempunyai jumlah tanggungan sebanyak 1 tanggungan keluarga, 7 responden atau 11,29 persen mempunyai jumlah tanggungan sebanyak 2 tanggungan keluarga, 14 responden atau 22,58 persen mempunyai jumlah tanggungan sebanyak 3 tanggungan keluarga, 17 responden atau 27,42 persen mempunyai jumlah tanggungan sebanyak 4 tanggungan keluarga, 11 responden atau 17,74 persen mempunyai jumlah tanggungan sebanyak 5 tanggungan keluarga, dan 9 responden atau 14,52 persen mempunyai jumlah tanggungan diatas 5 tanggungan keluarga. Mayoritas responden yang memiliki tanggungan sebanyak 4 tanggungan keluarga yaitu 7 responden atau 27,42 persen.

PEMBAHASAN

1. Tepat Sasaran

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya. Keberhasilan program dapat di tinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan dilakukan di lapangan. Sesuatu program dikatakan berhasil apabila kegiatan itu memberikan hasil.

Dari hasil penelitian diperoleh tanggapan masyarakat tentang ketepatan sasaran bantuan berada pada kriteria sangat efektif dengan skor indeks 83%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 9
Tanggapan Responden Tentang
Ketepatan Sasaran Bantuan

No.	Pertanyaan	S	S	C	T	S	Jumlah	Efektifitas
Tepat Sasaran								
1	Penerima BPNT Diberikan Kepada Keluarga Yang Telah Ditentukan Dan Terdaftar Dalam Penerima BPNT.	Jumlah 42	16	3	1	0	62	92%
		% 68%	26%	5%	2%	0%	100%	
2	Jumlah Penerima BPNT Ditentukan Dengan Rapat Dan Musyawarah Desa Setempat	Jumlah 23	27	5	3	4	62	80%
		% 37%	44%	8%	5%	6%	100%	
3	Penganti Penerima	Jumlah 22	23	9	5	3	62	78%

ma Atau Tambahan BPNT Dengan Melihat Kondisi Sosial Masyarakat Yang Bersangkutan.	%	35%	37%	15%	8%	5%	100%	
Total Frekuensi		87	66	17	9	7	186	83%
Total Skor		435	264	51	18	7	775	

Pada data di atas didapat berdasarkan hasil survei yang kemudian di masukkan kedalam skala likert yang telah dijabarkan sebelumnya. Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari ketiga indikator dengan nilai tertinggi pada indikator Penerima BPNT Diberikan Kepada Keluarga Yang Telah Ditentukan Dan Terdaftar Dalam Penerima BPNT dengan nilai 92%. Skor indeks tersebut mengindikasikan bahwa sebanyak 42 responden menyatakan bahwa bantuan Penerima BPNT Diberikan Kepada Keluarga Yang Telah Ditentukan Dan Terdaftar Dalam Penerima BPNT. berada pada kriteria Sangat efektif

Jika kondisi masyarakat memerlukan bantuan atau dirisakana miskin, maka akan dimasukkan sebagai penerima program BPNT.

Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output, artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tepat sasaran merupakan apa yang dikehendaki tercapai atau menjadi kenyataan seperti tepat sasaran pada masyarakat yang menerima dengan kondisi ekonomi rendah.

Hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Ana Rosaliana, bahwa Ketepatan sasaran penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai instrumen dalam program BPNT di Kecamatan Wonosobo masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Hal ini dikarenakan adanya indikasi kurang tepatnya

sasaran penerima BPNT yang dapat diidentifikasi melalui KKS.

2. Tepat Harga

Ketepatan dalam penentuan harga mencakup jumlah dana yang diberikan kepada masyarakat penerima BPNT. Pada awal diresmikannya BPNT dana yang diberikan kepada masyarakat penerima BPNT adalah sejumlah Rp. 110.000, kemudian pada awal tahun 2020 dana yang diberikan sejumlah Rp. 150.000, dan kemudian pada April 2020 sampai sekarang dana diberikan sejumlah Rp. 200.000. Maka dalam konteks ini perlu diperhatikan apakah pemilik e-warong yang menentukan harga barang sembaknya atau tidak.

Dari hasil penelitian diperoleh tanggapan masyarakat tentang ketepatan Harga bantuan berada pada kriteria sangat efektif dengan skor indek 84%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 10
Tanggapan Responden Tentang
Ketepatan Harga

No.	Pertanyaan	S	S	C	T	S	Jumlah	Efektifitas
Tepat Harga								
1	Nilai bantuan yang diterima sudah sesuai	Jumlah	34	21	3	1	3	62
		%	55%	34%	5%	2%	5%	100%
2	Tidak terdapat potongan atau pungutan saat menerima bantuan	Jumlah	32	23	4	2	1	62
		%	52%	37%	6%	3%	2%	100%
3	Penyaluran BPNT tidak terdapat poton	Jumlah	23	23	9	4	3	62
		%	37%	37%	15%	6%	5%	100%

gan dengan alasan untuk didistribusikan ke masyarakat lain								
Total Frekuensi	89	67	16	7	7	186	84%	
Total Skor	445	268	48	14	7	782		

Dari tabel diatas menjelaskan artinya responden setuju mengenai pernyataan tidak terdapat potongan dengan alasan apapun, baik dengan alasan didistribusikan ke masyarakat lain yang tidakmenrima program maupun alasan distribusi. Masyarakat mendapatkan sesuai dengan yang seharusnya diberikan.

Nilai pada data di atas didapat berdasarkan hasil survei yang kemudian di masukkan kedalam skala likert yang telah dijabarkan sebelumnya. Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari ketiga indikator dengan nilai tertinggi pada indikator Tidak terdapat potongan atau pungutan saat menerima bantuan dengan nilai 87%. Skor indek tersebut mengindikasikan bahwa sebanyak 32 responden menyatakan bahwa bantuan Penerima BPNT Diberikan kepada keluarga yang terdaftar dalam Penerima BPNT tidak dikenakan potongan, Hal ini membuktikan bantuan tersebut Tepat Harga berada pada kriteria Sangat efektif.

Dalam penelitian ini terlihat dari indikator Tepat harga, jawaban responden bahwa bantuan tersebut sudah efektif, hal ini dilihat dari nilai bantuan yang diterima sudah sesuai, Tidak terdapat potongan atau pungutan saat menerima bantuan maupun dalam penyaluran BPNT dengan alasan untuk didistribusikan ke masyarakat lainlain.

3. Tepat Jumlah

Ketepatan menentukan jumlah penerima adalah indikator yang digunakan untuk melihat tepatnya penentuan kuota penerima dalam satu kecamatan, yang terdiri dari banyak kepenghuluan. Dikarenakan proses penentuan jumlah kuota penerima itu diatur oleh Kemensos, maka terdapat adanya masyarakat yang juga belum menerima program BPNT tersebut yang

sebenarnya layak menjadi penerima.

Dari hasil penelitian diperoleh tanggapan masyarakat tentang ketepatan Jumlah berada pada kriteria sangat efektif dengan skor indeks 84%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 11
Tanggapan Responden Tentang
Ketepatan Jumlah

No.	Pertanyaan	S	S	C	T	S	Jumlah	Efektifitas	
Tepat Jumlah									
1	Adanya Ketepatan Jumlah Bahan Pangan Yang Diberikan Kepada Masyarakat.	Jumlah	41	14	3	1	3	62	89%
		%	66%	23%	5%	2%	5%	100%	
2	Penerima BPNT Dapat Memperoleh Beras Dan Telur Setiap Ada Distribusi.	Jumlah	49	9	2	1	1	62	94%
		%	79%	15%	3%	2%	2%	100%	
3	Pengambilan sembako disetiap E-	Jumlah	38	13	5	2	4	62	85%
		%	61%	21%	8%	3%	6%	100%	

warong sama jumlahnya								
Total Frekuensi	128	36	10	4	8	186	89%	
Total Skor	640	144	30	8	8	830		

Dari tabel diatas dapat dilihat Artinya responden setuju mengenai pernyataan Pengambilan sembako disetiap E-warong sama jumlahnya. Masyarakat dapat melakukan pengambilan batuan di E-warong yang sudah ditunjuk. Masyarakat akan mendapatkan jumlah bantuan yang sama ketika melakukan pengambilan di setiap E-warong yang ada.

Nilai pada data di atas didapat berdasarkan hasil survei yang kemudian di masukkan kedalam skala likert yang telah dijabarkan sebelumnya maka ketepatan harga yaitu 89% dikatan efektif. Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari ketiga indikator dengan nilai tertinggi pada indikator Penerima BPNT Dapat Memperoleh Beras Dan Telur Setiap Ada Distribusi dengan nilai 85%. Skor indeks tersebut mengindikasikan bahwa sebanyak 32 responden menyatakan bahwa bantuan Penerima BPNT Diberikan kepada keluarga yang terdaftar dalam Penerima BPNT tidak dikenakan potongan, Hal ini membuktikan penerima BPNT dapat memperoleh beras dan telur setiap ada distribusi.

Dalam penelitian ini terlihat dari indikator Tepat Jumlah, jawaban responden bahwa bantuan tersebut sudah efektif, hal ini dilihat dari adanya ketepatan jumlah bahan pangan yang diberikan kepada masyarakat, penerima BPNT dapat memperoleh beras dan telur setiap ada distribusi dan pengambilan sembako disetiap E-warong yang sama jumlahnya. Ketepatan dalam menentukan jumlah penerima dalam menjalankan program BPNT ini dilakukan oleh pihak Kementerian Sosial, yang dimana TKSJ juga tidak mengetahui bagaimana caranya proses penentuan kuota yang ditetapkan.

4. Tepat Waktu

Tepat waktu merupakan sejauh mana lembaga tepat waktu untuk menyalurkan BPNT kepada keluarga penerima manfaat (KPM) pada waktu setiap bulannya. Dari hasil penelitian diperoleh tanggapan masyarakat tentang ketepatan Waktu berada pada kriteria cukup

efektif dengan skor indeks 59%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 12
Tanggapan Responden Tentang
Ketepatan Waktu

No.	Pertanyaan	SS	S	CS	TS	STS	Jumlah	Efektifitas
Tepat Waktu								
1	Warga Penerima BPNT Selalu Tepat Waktu Dalam Menerima Bantuan Setiap Bulan.	Jmlh	5	12	15	19	11	62
		%	8%	19%	24%	31%	18%	100%
2	Adanya Kesesuaian Jadwal Waktu Pada Pendistribusian.	Jmlh	13	11	8	16	14	62
		%	21%	18%	13%	26%	23%	100%
3	Jadwal pendistribusian BPNT disosialisasikan dengan baik	Jmlh	15	14	15	11	14	62
		%	24%	23%	24%	18%	23%	100%
Total Frekuensi			33	37	38	46	32	186
Total Skor			165	148	114	92	32	551

Dari tabel diatas menjelaskan Berdasarkan analisis dan Observasi yang dipaparkan oleh peneliti masih belum efektif dikarenakan salah satu penerima BPNT merasa kecewa karena waktu penyaluran tidak menentu pada setiap bulannya. Sehingga masyarakat harus menutupi kebutuhan pangan sampai penukaran bantuan e-warong , hal ini dikarenakan oleh pihak penyalur bantuan BPNT di salurkan pada tanggal yang sudah ditentukan dikarenakan keterlambatan saldo dari pusat. Keterlambatan penyaluran bukan sepenuhnya tanggung jawab dari Dinas Sosial karena pihak pusat bekerja sama dengan Bank BRI yang merupakan penyalur untuk BPNT.

5. Tepat Kualitas

Ketepatan kualitas mencakup kualitas barang-barang sembako yang dijual oleh e-warong. Dalam pelaksanaan program BPNT ini barang-barang ini disediakan oleh e-warong yang bekerjasama dengan Bank. Masyarakat penerima program BPNT dapat membeli sembako yang sudah disediakan di e-warong masing-masing

kepenghuluan. Barang-barang sembako yang dapat diambil yaitu seperti beras, telur, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Akan tetapi setelah peneliti melakukan wawancara ternyata banyak masyarakat yang hanya mau mengambil beras dan telur saja.

Dari hasil penelitian diperoleh tanggapan masyarakat tentang ketepatan Kualitas berada pada kriteria sangat efektif dengan skor indeks 86%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.13 Tanggapan Responden Tentang Ketepatan Kualitas								
No.	Pertanyaan	SS	S	CS	TS	STS	Jumlah	Efektifitas
Tepat Kualitas								
2	BPNT mampu meringankan beban masyarakat	Jmlh	7	3	2	3	5	0
		%	33%	13%	9%	13%	22%	0%
3	Keluarga bapak/ibu/saudara bergantung dengan program BPNT yang diberikan pemerintah	Jmlh	3	1	4	3	3	62
		%	5%	2%	6%	5%	5%	100%
Total Frekuensi			10	5	1	6	4	18
Total Skor			33	15	9	18	20	55

Total Skor	5	2	5	1	4	80
	1	1	7	2		4
	5	6				

Dari tabel diatas membuktikan bahwa penerima BPNT mendapatkan kualitas beras yang diberikan layak untuk dikonsumsi, bantuan yang diberikan BPNT mampu meringankan beban masyarakat serta Keluarga penerima bergantung dengan program BPNT yang diberikan pemerintah. Penerima BPNT tidak hanya bisa mengambil beras dan telur, melainkan bisa juga mengambil kacang-kacangan. Akan tetapi penerima program BPNT lebih memilih untuk mengambil beras dan telur saja. Hal tersebut dikarenakan beras dan telur itu dianggap paling penting bagi masyarakat penerima.

Masyarakat yang membeli sembaknya dari e-warong dapat memilih sendiri barang yang dibeli. Barang yang dibeli oleh masyarakat terkadang memiliki kualitas yang baik dan sesekali mendapat kualitas yang kurang bagus. Kualitas barang yang disediakan di e-warong tidak selamanya bagus. Terkadang sembako yang disediakan juga memiliki kualitas yang kurang bagus, yaitu seperti telur yang sudah masuk angin dan beras yang berbatu.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Diah Mukminatul Hasimi, bahwa indikator 6T ketepatan BPNT sangat berpengaruh terhadap kesuksesan suatu program BPNT di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Dari indikator 6T bahwa pada kenyataan di lapangan program BPNT ini hanya dapat memenuhi 3 indikator yaitu tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat harga.

6. Tepat Administrasi

Ketepatan administrasi adalah indikator yang digunakan untuk melihat pendataan, yang terdiri dari pendataan masyarakat penerima dan apa saja yang diperlukan saat pendataan masyarakat penerima BPNT.

Ketepatan administrasi dalam pendataan calon penerima BPNT itu memiliki beberapa persyaratan seperti harus penduduk di daerah pelaksanaan, fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga, dan dengan penghasilan 25% terendah di daerah pelaksanaan. Pendataan calon penerima program BPNT ini langsung didata oleh Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil.

Tabel 3. 14
Tanggapan Responden Tentang
Ketepatan Kualitas

N	Pertanya	S	S	C	T	S	Ju	Efe
---	----------	---	---	---	---	---	----	-----

o	an	S	S	S	T	ml	ktifi
.					S	ah	tas
Tepat Administrasi							
1	Adanya Kejelasan Mengenai Persyaratan Administrasi.	Jumlah	15	22	8	11	662
		%	24%	35%	13%	18%	100%
2	Ketepatan Administrasi Bermanfaat Bagi Penerima BPNT	Jumlah	16	11	19	9	762
		%	26%	18%	31%	15%	100%
3	Keterbukaan Dalam Menentukan Administrasi Secara Benar	Jumlah	15	27	9	8	564
		%	24%	44%	15%	13%	103%
Total Frekuensi			46	60	36	28	188
Total Skor			230	240	108	518	70%

Dari tabel diatas menjelaskan Nilai pada data di atas didapat berdasarkan hasil survei yang kemudian di masukkan kedalam skala likert yang telah dijabarkan sebelumnya. Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari ketiga indikator dengan nilai tertinggi pada indikator Keterbukaan Dalam

Menentukan Administrasi Secara Benar dengan nilai 75%. Skor indeks tersebut mengindikasikan bahwa sebanyak 27 responden menyatakan setuju bahwa dalam administrasi dilakukan secara baik dan benar. Adanya Kejelasan Mengenai Persyaratan Administrasi, adanya ketepatan Administrasi Bermanfaat Bagi Penerima BPNT serta adanya Keterbukaan Dalam Menentukan Administrasi Secara Benar.

Ketepatan administrasi dalam hal pendataan masyarakat penerima BPNT sudah baik dan berjalan sebagaimana mestinya. Hanya saja sesekali terjadinya kesalahan yang diakibatkan pada saat pengisian data. Tapi hal tersebut tentu saja dapat diperbaiki.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iwan Hermawan menunjukkan bahwa pelaksanaan BPNT di Kota Yogyakarta secara umum berjalan efektif namun dengan catatan jika dilihat berdasarkan indikator prinsip 6 T. Dimensi administrasi menjadi dimensi yang belum berperforma baik dibandingkan dimensi lainnya. Apalagi dimensi-dimensi lain yang sudah efektif ternyata masih berpotensi menurun kinerjanya karena berbagai faktor berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Diah Mukminatul Hasimi bahwa efektivitas penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dari 6 (enam) indikator yakni tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi sudah berjalan dengan efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan dari peneliti serta uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir adalah Pelaksanaan program Bantuan Pangan Nontunai di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko berdasarkan indikator tepat sasaran dapat dikatakan sudah terlaksana secara efektif. Kemudian Pelaksanaan program Bantuan Pangan Nontunai di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko berdasarkan

indikator tepat harga dapat dikatakan sudah terlaksana secara efektif . Kemudian Pelaksanaan program Bantuan Pangan Nontunai di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko berdasarkan indikator tepat jumlah dapat dikatakan sudah terlaksana secara efektif . Pelaksanaan program Bantuan Pangan Nontunai di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko berdasarkan indikator tepat waktu dapat dikatakan belum terlaksana secara efektif. Pelaksanaan program Bantuan Pangan Nontunai di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko berdasarkan indikator tepat kualitas dapat dikatakan sudah terlaksana secara efektif .Pelaksanaan program Bantuan Pangan Nontunai di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko berdasarkan indikator tepat administrasi dapat dikatakan belum terlaksana secara efektif .

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Syifa Dinarila Balqis, Iskatinah, Wahyu Hariadi.2020. Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berdasarkan Permensos Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Karanganyar Keamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 2, Nomor 1*
- BULOG, “Sekilas RASKIN”, diakses dari http://www.bulog.co.id/sekilas_raskin.php,
- Berbasis Literasi Ekonomi Dan Modal Sosial, Malang: C.V Seribu Bintang.
- Bungin, Burhan. 2013. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta. Prenada Media Group
- Diah Mukminatul Hasimi. 2020. Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam. *REVENUE : Jurnal Manajemen Bisnis Islam Vol 2, No 1,81-94*
- Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018. *Petunjuk Teknis*

- Mekanisme Penyaluran bantuan Pangan Non Tunai. Jakarta.
- Hertanti, Siti. "Pelaksanaan Program Karang Taruna dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4.4 (2019): 69-80.
- Henry J.D Tamboto & Allen A.Ch. Manongko. 2019. Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir; <https://momenriau.com/read/detail/5024/penegak-hukum-usut-tuntas-dugaan-penyimpangan-bansos-bpnt-rohil>
- Iwan H., Izzaty, Eka Budiyantri, Rafika Sari, Yuni Sudarwati, dan Mohammad Teja/Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 12(2), 2021, 131 - 145
- Kriyantono, Rachmat. 2012. Teknis Praktis Riset Komunikasi. Jakarta. Kencana.
- Loekman Soetrisno, "Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia", Terj. Awan Setya Dewanta dkk. (Yogyakarta : Aditya Media, 1995), hlm 17
- Muh. Yusril, Rahma Muin, Baharuddin Baharuddin. 2022. Efektifitas Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Paku". J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam. Vol. 7, No. 1
- Muslim, hidayat, Eriyanti, F., & Mubarak, A. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Kuranji Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(2), 60 - 68.
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai. 2017. Jakarta
- Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 40 Tahun 2016
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018
- Pratiwi, Amira Azari. "Evaluasi Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis." (2022).
- Rosaliana, A., & Hardjati, S. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. *Public Administration Journal of Research*, 1(2), 96-111.
- Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara", (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.14
- Redaksi Sinar Grafika, "UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap"(Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.3
- Roring, Andreas Delpiero, Michael Mantiri, and Marlien T. Lopian. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan." *GOVERNANCE* 1.2 (2021).
- Siregar, Syofian. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT Fajar. Interpratama Mandiri.
- Sarbini, S. H., Sigit Supto Nugroho, and M. SH. *Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Bingkai Pancasila*. Penerbit Lakeisha, 2023.
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. 2017. Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai. Jakarta.
- Tubagus Achmad Choesni, dkk, 2016. Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai. Jakarta.
- undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
- Zainal Fadri, 2019. "Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Yogyakarta", *Jurnal Pengembangan Masyarakat islam* Vol. 10, No. 1,